

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Jadi dengan pendaftaran tanah melalui program PTSL ini, dalam hal ini pemerintah memberikan rangsangan kepada pemegang hak atas tanah agar mau mendaftarkan tanahnya dan berusaha membantu menyelesaikan sebaik baiknya sengketa-sengketa tanah yang sifatnya strategis, dengan jalan memberikan kepada mereka (pemegang hak atas tanah) berbagai fasilitas atau kemudahan.

Kantor Pertanahan Kota Padang yang beralamat di jalan Ujung Gurun No. 1 Padang Barat merupakan barometer di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat karena merupakan ibukota provinsi dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN.

Efektifnya suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel serta indikator penentu kebijakan. Variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan implementasi yang efisien. Dalam penelitian implementasi Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang No. 1 Tahun 2017 mengenai PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kantor Pertanahan Kota Padang ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang menggunakan empat variabel utama yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi, yang akan dijelaskan berikut ini:

## 1. Komunikasi

Penelitian ini dianalisis menggunakan model implementasi Edwards III dengan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi sudah baik, dimana program ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan target dari program, dan juga dilakukan pelatihan kepada implementator, untuk kejelasan dari program ini pedomannya adalah Permen No 1 Tahun 2017 tentang PTSL disertai dengan juknis-juknis yang mengaturnya, Namun pada beberapa aspek belum berjalan efektif, berdasarkan temuan peneliti, untuk kejelasan juga mengalami kendala sebab adanya pengakuan dari staff yang mengaku kendala yang dihadapi lapangan sangat banyak sedangkan program mempunyai target waktu dan target pencapaian, akan tetapi tidak ada kejelasan yang menjadi panduan implementator dalam menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan program.

## 2. Sumber daya

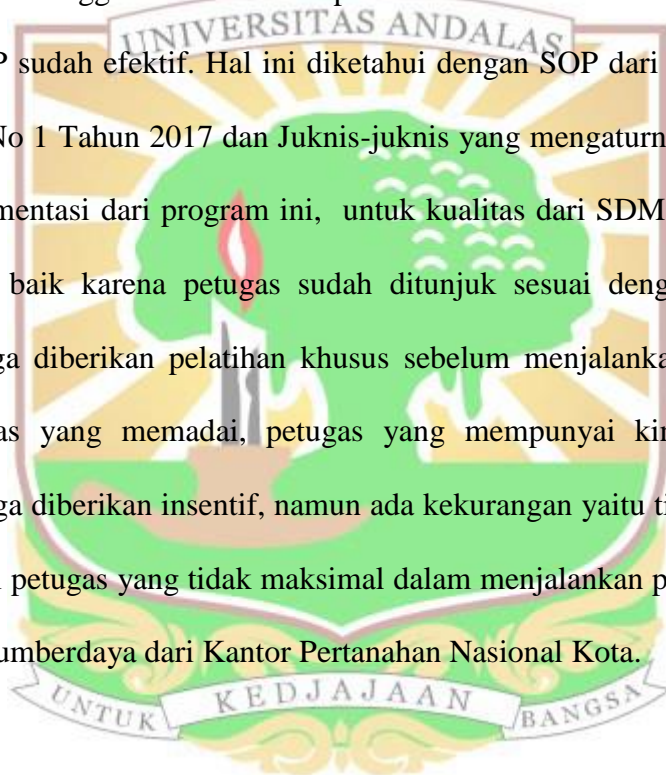
Berdasarkan model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dengan variabel Staff, informasi, kewenangan, Fasilitas dan dana. Temuan peneliti di lokasi penelitian berdasarkan hasil wawancara , observasi, serta dokumentasi mengenai fasilitas yang digunakan maka dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya yang meliputi beberapa indikator tersebut tidak semuanya berjalan dengan baik dalam pengimplementasian program *PTSL* di Kota Padang. Untuk fasilitas yang dimiliki Kantor Pertanahan Nasional Kota Padang sudah baik, untuk wewenang masing-masing implementator sudah diatur oleh Permen No 1 Tahun 2017 beserta Juknis Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016, untuk pendanaan atau anggaran pelaksanaan program juga sudah diatur yakni untuk perbidang tanahnya diberikan anggaran Rp. 483,000 serta penggunaan anggaran ini dilakukan secara transparan, namun untuk sumber daya manusia masih dirasa kurang dari segi kuantitas, dari segi indikator informasi masih belum efektif karena kurangnya koordinasi antarlini dalam penyelesaian kendala lapangan. Kemudian

### 3. Disposisi

Analisis dengan menggunakan model implementasi Edwards III bahwa variabel disposisi, yaitu pengangkatan birokrat dan insentif disimpulkan belum berjalan efektif, hal ini terkendala dengan jumlah SDM yang memadai. Sedangkan tidak adanya hukuman bagi implementator jika tidak menjalankan program dengan maksimal dapat memengaruhi sikap implementor, sehingga insentif belum berjalan efektif dalam implementasi kebijakan ini.

### 4. Struktur Organisasi

analisis dengan menggunakan model implementasi Edwards III bahwa variabel struktur birokrasi, yaitu SOP sudah efektif. Hal ini diketahui dengan SOP dari pelaksanaan program ini adalah Permen No 1 Tahun 2017 dan Juknis-juknis yang mengaturnya, mengenai struktur organisasi dan fragmentasi dari program ini, untuk kualitas dari SDM yang bertugas dalam program ini sudah baik karena petugas sudah ditunjuk sesuai dengan keahlian masing-masing, mereka juga diberikan pelatihan khusus sebelum menjalankan program ditunjang lagi dengan fasilitas yang memadai, petugas yang mempunyai kinerja yang baik dan memenuhi target juga diberikan insentif, namun ada kekurangan yaitu tidak adanya hukuman atau Punishment bagi petugas yang tidak maksimal dalam menjalankan program ini, kemudian kurangnya jumlah sumberdaya dari Kantor Pertanahan Nasional Kota.



## 6.2 Saran

1. Perlu ditingkatkan komunikasi antar lini terutama dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh implementor pada saat pelaksanaan program, sehingga kendala seperti permasalahan tanah ulayat contohnya dapat diselesaikan dengan cepat mengingat program ini mempunyai target pencapaian dan terget waktu penyelesaian.
2. Ketika diketahui bahwa pada pelaksanaan program implementator kekurangan jumlah sumber daya manusia, seharusnya dilakukan penambahan anggota atau staff dengan cepat mungkin bisa diambil dari tenaga honorer atau diperbantukan oleh instansi

lainnya semisal melibatkan lebih banyak dari pihak kecamatan atau kelurahan terutama dalam percepatan penyelesaian kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan program

3. Memang terdapat insentif bagi para staff yang dapat, yakni berupa promosi jabatan dan sebagainya namun tidak terdapat hukuman jika program tidak terlaksana dengan maksimal, seharusnya punishment atau hukuman ini perlu diberikan untuk meningkatkan motivasi para staff dalam melaksanakan program PTSL ini.

